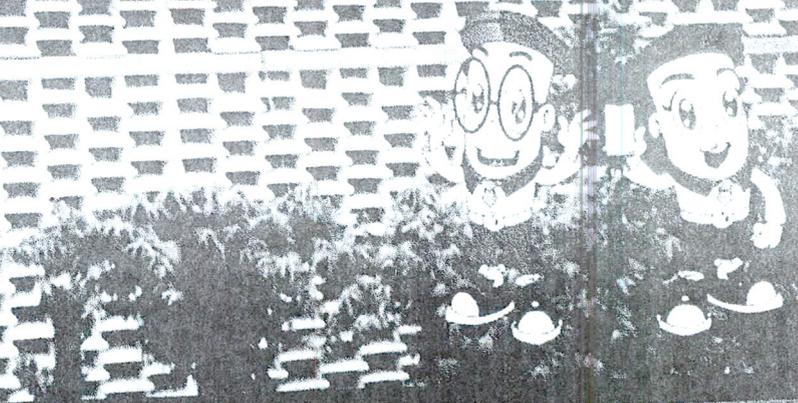


DITERIMA DARI: Bawaslu
NOMOR 32.1326 /PHPU DPR-DPRD-XYII/2019
HARI : Jumat
TANGGAL : 5 Juli 2019
JAM : 16.36 WIB



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH



KETERANGAN TERTULIS BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PHPU PEMILU DPR RI, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN KOTA TAHUN 2019

ALAMAT KANTOR: Jl. Sungai Moutong Nomor 8 Palu, Sulawesi Tengah

2. Keterangan Tertulis Atas Permohonan Partai Hanura

2.1. Keterangan Tertulis Nomor Registrasi Perkara 32-13-261/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dapil II

a. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terdapat **keberatan atas penetapan perolehan partai Hanura sebesar 13.775 suara dan Partai Perindo 15.692 suara pada Dapil 2 Sulawesi Tengah 2 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, karena terjadi pelanggaran, kecurangan, dan kesalahan input oleh KPU. Seharusnya suara Partai Hanura adalah 15.692 suara**, terhadap hal tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pencermatan terhadap dokumen-dokumen hasil pengawasan dan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pengawasan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, perolehan suara setiap peserta pemilu untuk pemilu DPRD Provinsi Dapil II Sulawesi Tengah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	18,395
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	40,754
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	27,659
4.	Partai Golongan Karya	18,452
5.	Partai Nasdem	34,166
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	2,521
7.	Partai Berkarya	7,864
8.	Partai Keadilan Sejahtera	10,119
9.	Partai Persatuan Indonesia	15,692
10.	Partai Persatuan Pembangunan	4,544
11.	Partai Solidaritas Indonesia	3,533
12.	Partai Amanat Nasional	10,531
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	13,775
14.	Partai Demokrat	15,876
19.	Partai Bulan Bintang	10,725
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	146

(PK.28.8-01)

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pengawasan seluruh tahapan dengan melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan seluruh temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Selama tahapan penyelenggaraan pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tidak pernah mendapat temuan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait partai Hanura. Selain itu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan inventarisasi mengenai dugaan pelanggaran selama tahapan Pemilu di Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong (Dapil II Sulteng), berdasarkan hasil inventarisasi selama tahapan Pemilu terdapat sebanyak 5 (lima) temuan dan sebanyak 8 (delapan) laporan.
3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon menyatakan adanya **Tindakan-tindakan yang melanggar prinsip jujur dan adil, dengan cara memberikan uang atau materi lainnya (*Money Politic*)**, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan inventarisasi penanganan temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran berkaitan dengan peristiwa **memberikan uang atau materi lainnya (*money politic*)** selama tahapan Pemilu di Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong (Dapil II Sulteng), berdasarkan hasil inventarisasi selama tahapan Pemilu terdapat sebanyak 1 (satu) temuan dan sebanyak 4 (empat) laporan terkait peristiwa **memberikan uang atau materi lainnya (*money politic*)**, data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud di Kabupaten Parigi Moutong beserta tindaklanjutnya sebagai berikut :

NO	Nomor Temuan/Laporan Dan Tanggal Registrasi	Peristiwa Dugaan Pelanggaran	Pelapor/Penemu Terlapor	Kajian/Rekomendasi
1.	01/LP/PL/KAB/26.07/ /2019 02 Januari 2019	Kampanye disarana Ibadah.	Halil Khan (Pelapor) Rafiq Al-Amri (Terlapor)	Pelanggaran Pemilihan (<i>Vide</i> Pasal 280 ayat (1) huruf h Jo. Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan di teruskan ketahap penyidikan Sentra Gakkumdu.

2.	02/LP/PL/KAB/26.07/I V /2019 15 April 2019	Kampanye dimasa tenang dan money politic	Rudiyanto (Pelapor) & I Wayan Nicen (Terlapor)	laporan yang dilaporkan oleh Rudiyanto diregistrasi pada hari Senin tanggal 15 April 2019, tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan umum tahun 2019, sehingga laporan ini tidak dapat ditindaklanjuti oleh Penyidik Gakkumdu.
3.	03/LP/PL/KAB/26.07/I V /2019 26 April 2019	Kampanye dimasa tenang dan money politic	Moh. Haryun (Pelapor) & Saiful Bahri, SH (Terlapor)	laporan yang dilaporkan oleh Moh. Haryun diregistrasi pada hari Jumat tanggal 26 April 2019, tidak memenuhi unsur atau delik pidana pemilihan umum tahun 2019, sehingga laporan ini tidak dapat ditindaklanjuti oleh Penyidik Gakkumdu.
4.	04/LP/PL/KAB/26.07/I V /2019 26 April 2019	Dugaan pelanggaran politik uang	Isnandar (Pelapor) & Putu Kirana dan I Putu Eddy Tangkas (Terlapor)	laporan yang dilaporkan oleh Isnandar diregistrasi pada hari sabtu tanggal 27 April 2019, tidak memenuhi unsur atau delik pidana pemilihan umum tahun 2019, sehingga laporan ini tidak dapat ditindaklanjuti oleh Penyidik Gakkumdu
5	05/LP/PL/KAB/26.07/I V/2019 20 April 2019	Politik Uang	Maswandi D. Hala (Pelapor) & Moh. Zen (Terlapor)	laporan yang dilaporkan oleh Maswandi D. Hala diregistrasi pada hari sabtu tanggal 20 April 2019, tidak memenuhi unsur atau delik pidana pemilihan umum tahun 2019, sehingga laporan ini tidak dapat ditindaklanjuti oleh Penyidik Gakkumdu.

(PK.28.8-02)

4. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon adanya **kesalahan penginputan suara oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah**, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pengawasan selama proses rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan hasil Pengawasan tersebut dalam Formulir Model DB-1 KPU Kabupaten Parigi Moutong dan Model DC-1 KPU Provinsi Sulawesi Tengah, **perolehan suara sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Hanura berjumlah 13.775.** (Vide PK.28.8-01 dan PK.28-01)

- 4) Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong (**Vide PK.28-49**)
- 5) Bawaslu Kabupaten Tolitoli (**Vide PK.28-50**)
- 6) Bawaslu Kabupaten Buol (**Vide PK.28-51**)
- 7) Bawaslu Kabupaten Poso (**Vide PK.28-52**)
- 8) Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una (**Vide PK.28-53**)
- 9) Bawaslu Kabupaten Morowali Utara (**Vide PK.28-54**)
- 10) Bawaslu Kabupaten Morowali (**Vide PK.28-55**)
- 11) Bawaslu Kabupaten Banggai (**Vide PK.28-56**)
- 12) Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan (**Vide PK.28-57**)
- 13) Bawaslu Kabupaten Banggai Laut (**Vide PK.28-58**)

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi.



Ruslan Husen S.H., M.H.
Ketua


Jamrin, S.H., M.H.
Anggota


Darmiati, S.H.
Anggota


Sutarmin D. Hi. Ahmad, S. Hut, M. Sc.
Anggota


Zatriawati, S.E., M.P.W.P.
Anggota